

pelayanan publik yang relatif sama dapat tercapai; (c) pembangunan perdesaan, meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik seperti akses pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

4.1 Arahan RPJPD 2007 – 2025 Terhadap RKPD 2018

Rumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RKPD 2018 tidak boleh terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2009, bahwa semua agenda pembangunan diarahkan untuk mewujudkan 3 (tiga) misi pembangunan daerah. Ketiga misi tersebut diupayakan pencapaiannya melalui berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan.

RKPD 2018 akan ditekankan pada membangun daya saing kompetitif perekonomian, hal ini juga merupakan kebijakan kunci untuk tercapainya misi RPJPD 2007-2025, khususnya Misi Pertama, yaitu ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal***, yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga. Daya saing kompetitif tersebut akan diupayakan pencapaiannya melalui dua kebijakan umum, yaitu (a) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang didukung antara lain dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan UMKM, akselerasi pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan efisiensi logistik dan distribusi yang merata diseluruh wilayah, dan peningkatan investasi; serta (b) pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah, dengan prioritas pada penguatan konektivitas regional maupun nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pengembangan daerah tertinggal dan perdesaan, pengembangan wilayah strategis, pembangunan perkotaan dan perdesaan, pembangunan RTRW, dan pengembangan tata kelola pemerintahan. Sebagai basis pembangunan daya saing perekonomian yang kompetitif, Kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya manusia berkualitas, keunggulan sumber daya

alam, dan meningkatkan kemampuan iptek. Hal ini juga mengacu pada arah terwujudnya **Misi Kedua** RPJPD, yaitu **Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal**, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. Juga dengan **Misi ketiga RPJPD, yaitu Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah**, adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, *right-sizing* OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Dalam mengupayakan pencapaian misi-misi tersebut, kebijakan umum yang akan dilaksanakan dalam RKPD 2018 adalah: (a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung antara lain dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan UMKM, pariwisata, akselerasi pertumbuhan industri pengolahan, dan peningkatan investasi; (b) Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, yang diprioritaskan pada ketahanan pangan, energy dan ketahanan air; (c) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, dengan prioritas pada pemenuhan infrastruktur dasar, penyediaan transportasi, dan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dan informasi; (d) pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, Peningkatan kualitas pelayanan public, Penerapan *e-government* untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, Peningkatan Kapasitas manajemen kinerja pembangunan, Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah, dan Membangun Kemitraan dan kerjasama (e) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dengan prioritas kebijakan kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan percepatan pengurangan kemiskinan; (f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan konservasi hutan serta mitigasi bencana alam; serta (e) pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah, dengan



prioritas pada penguatan konektivitas daerah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pengembangan desa tertinggal dan pengembangan wilayah strategis.

Tabel 4.1
Matriks Arahan Rjppd 2007 - 2025 Terhadap RKPD 2018

Misi RPJPD 2007-2025	Arahan RPJPD	Kebijakan Umum RKPD 2018	Prioritas RKPD 2018
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal	Pembangunan pertanian bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh	Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengelolaan bencana	1. Pembangunan Pertanian & Perikanan Kelautan untuk Ketahanan pangan 2. Pembangunan Kelautan 3. Ketahanan Air dan Energi Kelistrikan 4. Konservasi hutan & perbaikan Kualitas LH, serta mitigasi bencana
	Pembangunan usaha pertambangan		
	Pembangunan & pengembangan industri	peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1. Peningkatan daya saing tenaga kerja 2. Peningkatan Koperasi dan UMKM 3. Pengembangan Industri berbasis potensi daerah 4. Pembangunan Pariwisata & Peningkatan Investasi
	Pembangunan pariwisata		
	Pembangunan perdagangan & jasa		
	Pengembangan investasi yang mendorong sektor riil		
	Pengembangan koperasi dan UKM	Mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pertumbuhan & Pemerataan Pembangunan Daerah	Pembangunan Teknologi dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dasar & meningkatkan konektivitas daerah dan Penataan Ruang
Pembangunan infrastruktur (fisik & non-fisik)			
	Pengembangan wilayah strategis dan perdesaan	Pembangunan wilayah strategis	
		Pembangunan Perdesaan	
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal	Peningkatan akses & kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	1. Kesehatan & Gizi Masyarakat 2. Pendidikan 3. Kebudayaan & Agama 4. Penanggulangan Kemiskinan
	Pembangunan kesehatan utk peningkatan akses & kualitas lauanan		
	Pembangunan kependudukan utk peningkatan kualitas kesehatan ibu & anak		
	Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama		
	Pembangunan sosial budaya diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan		
	Jaminan Perlindungan sosial		
	Budaya dan adat isitiadat		
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah	Peningkatan pelayanan Publik	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai landasan pembangunan disegala bidang	1. Terus melakukan Reformasi Birokrasi 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Pemantapan stabilitas keamanan & politik daerah 4. Pemantapan Hukum & Peraturan Daerah 5. Membangun kemitraan dan kerjasama
	Pengembangan Kualitas Aparatur		
	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah		
	Pembangunan keuangan daerah		
	Pengembangan infrastruktur pemerintahan		
	Pembangunan Kemitraan daerah		
	Pembangunan Hukum & Perundang-undangan		
	Koordinasi Pemerintahan		
	Kemanaan dan Ketertiban		
	Sosial dan Politik		

4.2 Sasaran Pokok Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan, yaitu pembangunan yang kuat dan berkelanjutan serta berbagai pertimbangan tantangan dan permasalahan yang ada (diuraikan pada BAB II), maka sasaran Pokok pembangunan Gorontalo yaitu :

1. Ekonomi

Perekonomian Gorontalo harus dijaga tetap tumbuh relatif tinggi secara berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diperoleh berlandaskan penguatan struktur ekonomi, melalui ***penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah*** sesuai keunggulan wilayah juga ***modernisasi sektor jasa*** yang didukung oleh ketersediaan layanan ***infrastruktur yang memadai***. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan ***penguatan peranan UKM*** yang lebih besar, peningkatan jumlah ***kesempatan kerja***, khususnya ***tenaga kerja produktif (decent jobs)***, dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (***financial inclusion***). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun ***ketahanan pangan dan ketahanan air*** dan kelautan.

2. Tata Kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ***bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien***, yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Kesejahteraan Rakyat

Sasaran pokok pembangunan kesejahteraan rakyat tercapainya penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah sebagai hasil pembangunan yang inklusif. Meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat atau ***penurunan kemiskinan***, tetapi tetapi juga harus terlihat dari menurunnya ***laju pertumbuhan penduduk***, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu taraf ***pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat***, serta terciptanya system ***perlindungan sosial masyarakat*** yang baik.

4. Kewilayahan dan Desa

Pembangunan Kewilayahan dan Desa ditujukan untuk penurunan tingkat kesenjangan antar-wilayah yang ditunjukkan dengan ***menurunnya jumlah Desa tertinggal***, serta lebih meningkat dan merata pelayanan dasar di berbagai wilayah di Gorontalo.

5. Lingkungan, konservasi hutan dan mitigasi bencana

Sasaran pembangunan ini adalah untuk pengendalian, bahwa pembangunan diberbagai bidang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

4.3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Sebagaimana sasaran pokok pembangunan daerah, maka rumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo diuraikan dalam 5 Agenda utama pembangunan daerah, yaitu:

4.3.1 Agenda Pembangunan Ekonomi

Agenda utama pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan sektor-sektor ekonomi; pengamanan ketahanan pangan, energi, dan air; pembangunan infrastruktur; dan penguatan faktor utama pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk membuat struktur ekonomi yang kuat agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pembangunan yang inklusif agar kesejahteraan lebih merata dan lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta terjadi secara berkelanjutan.

1. Pengembangan Sektor Primer

Pengembangan sektor primer dimaksudkan untuk meningkatkan produksi komoditi primer dan menyiapkan komoditi primer sebagai bahan baku industri pengolahan yang mencakup peningkatan hasil pertanian dan perikanan.

Peningkatan Hasil Pertanian dan Perikanan

Sasaran : Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang difokuskan pada : (1) peningkatan produktivitas, dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan potensial untuk ekspor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan.

strategi dan kebijakan yang dilakukan meliputi :

- **Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat.** Peningkatan produktivitas merupakan upaya penting dalam revitalisasi perkebunan dan hortikultura. Peningkatan produktivitas tersebut terutama dilakukan melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor.
- **Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,** melalui: (1) penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir; (2) pengembangan/penerapan standard jaminan mutu komoditas pertanian dan standar jaminan mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (3) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pertanian; (4) Peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (5) Peningkatan kualitas layanan pengawasan perkarantinaan.
- **Pengembangan agroindustri perdesaan,** diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui : Perbaikan dan penguatan teknologi agroindustri perdesaan yang sudah ada, Penguatan Kelembagaan

- industri pengolahan pertanian yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi, Pengembangan industri perdesaan yang menangani produk segar hortikultura/diversifikasi produk, Pertumbuhan agroindustri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil secara optimal, dan Pengembangan kapasitas SDM (Produk agroindustri yang dibutuhkan masih banyak di impor antara lain : sayuran dan buah-buahan, produk agroindustri yang potensial dikembangkan terutama cabe, kopi, kakao, kelapa).
- **Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar** termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran melalui: (1) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (2) penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (3) pengembangan jaringan pasar dan pelayanan informasi pasar.
 - **Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran** melalui kemitraan Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir serta membangun dan memperkuat jaringan dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya.

Tabel 4.2
Sasaran Produksi Komoditas Pertanian

Uraian	Baseline (2016)	Sasaran 2018
1. Produksi Perkebunan		
Kelapa	54.868 ton	55.186 ton
Tebu	49.331	50.101 ton
Cengkeh	937 ton	941 ton
Kakao	4.564,6 ton	4936 ton
Nilam (Minyak Atsiri)	43 ton	43,09 ton
Pala	3 ton	3,03 ton
2. Hortikultura		
Bawang Merah	1.108 ton	1.130 ton
Cabai	10.525 ton	10.683 ton
Jeruk	864 ton	882 ton

Sasaran : Peningkatan Industri Usaha Perikanan

Strategi dan Arah Kebijakan

- **Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan**, melalui: (1) pengembangan kapasitas, produktifitas dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan (rumput laut, ikan asap, ikan asin, udang paname, kerapu); (2) revitalisasi dan pembangunan pabrik es, *cold storage* di lokasi-lokasi yang tepat.



- **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan**, melalui: (1) pengembangan balai benih ikan/udang.
- **Penguatan Kelembagaan**, melalui: (1) penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPP; (2) pengawasan penguatan pengelolaan wilayah perikanan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi; (3) penataan perizinan yang terintegrasi; (4) penguatan kelompok usaha perikanan dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan yang mudah dan terjangkau;
- **Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM Perikanan**, melalui peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

2. Pengembangan Sektor Jasa

Pengembangan sektor jasa difokuskan pada peningkatan daya saing UMKM dan koperasi; serta peningkatan pariwisata.

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi :

Jumlah UMKM dan Koperasi semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun belum dapat bersaing secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala dalam meningkatkan kualitas UMKM dan Koperasi, terutama dengan skala usaha mikro, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, modal, dan pemanfaatan teknologi.

Sasaran : Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM yang ditunjukkan oleh meningkatnya produktivitas, jumlah UMKM yang terdaftar/formal, meningkatnya akses ke pembiayaan dan teknologi, meningkatnya kualitas produk, dan meningkatnya keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha.

Strategi : Peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan koperasi;
2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi;
4. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi melalui perumusan regulasi.

Perdagangan

Beberapa hal yang masih menjadi focus perhatian dalam peningkatan perdagangan regional adalah kurang memadainya sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar rakyat dan pusat distribusi serta masih lemahnya mekanisme dalam pengendalian harga kebutuhan pokok yang sering bergejolak.

Sasaran : Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung ekspor komoditi daerah dan penguatan pengendalian harga

Strategi : Mendorong pembangunan sarana distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan meningkatkan layanan standardisasi produk

Kebijakan :

1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan serta menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok.
2. Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi produk dan perlindungan konsumen.

Tabel 4.3
Sasaran Koperasi UMKM dan Perdagangan

Uraian	Baseline (2016)	Sasaran 2018
Jumlah Koperasi Aktif	658 koperasi	660 koperasi
Jumlah IKM	14.339 IKM	14.150 IKM
Jumlah Sentra IKM	297 sentra	312 sentra
Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	n/a	n/a
Jumlah BPR/LKM	n/a	n/a
Jumlah KUMKM yang difasilitasi akses permodalan	15.381 KUKM	540 KUKM
Nilai Ekspor	144.291 ton	240.068 ton
Volume Perdagangan antar pulau	120.118 ton	200.000 ton
Indeks Keberdayaan Konsumen	n/a	n/a

Peningkatan Pariwisata

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata pada umumnya menunjukkan kecenderungan pencapaian kinerja yang semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo.

Sasaran : Meningkatnya jumlah wisatawan domestic dan mancanegara

Tabel 4.4
Sasaran Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Uraian	Baseline (2016)	Sasaran 2018
Pertumbuhan PDB Pariwisata		
Jumlah Wisatawan	368.000	3000 Wisman & 127.000 Wisnus

Strategi : Mengembangkan Pariwisata Daerah

Arah Kebijakan :

1. **Promosi Pariwisata Daerah** diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal, fokus pada 6 kawasan strategis pengembangan dan pembangunan pariwisata yang ditetapkan dalam RIPPDA.



2. **Pembangunan Destinasi Pariwisata** diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri.
3. **Pembangunan Kelembagaan Pariwisata** diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan.

3. Ketahanan Pangan, dan Air

Ketahanan Pangan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang menyusun Buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, dimana didalamnya terdapat proyeksi penduduk untuk setiap provinsi. Provinsi Gorontalo ditahun 2020 di proyeksikan penduduknya bisa mencapai 1.219.600 dan pada tahun 2025 bisa mencapai 1.299.700. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat diiringi dengan isu pemenuhan nutrisi bagi penduduk akan menjadi tantangan kedepan. Dengan proyeksi penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun tersebut, maka kebutuhan pangan yang harus disediakan juga cukup besar. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menuntaskan permasalahan kekurangan gizi.

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan dan perikanan dengan tetap menjaga kualitas konsumsi pangan.

Tabel 4.5
Sasaran Ketahanan Pangan

Komoditi	Satuan	Baseline 2016	Sasaran 2018
1. Produksi			
a. Padi	Ton	332.315	333.016
b. Jagung	Ton	911.341	1.033,46
c. Kedelai	Ton	3.660	4.160
d. Daging Sapi	ton	1.920,07	2.037,00
e. Daging Ayam	Ton	1.621,78	1.720,55
f. Perikanan (diluar rumput laut)	Ton	153.968	172.427
g. Perikanan Tangkap	Ton	115.873	127.296
h. Perikanan Budidaya	Ton	38.295	45.131
i. Budidaya Rumput Laut	Ton	61.950	50.478
2. Konsumsi			
a. Konsumsi Kalori KKL	Kkal	n/a	n/a
b. Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	55,7	57,38
3. Skor Pola Pangan Harapan		79,4	84,7
4. Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	2,500,000	2.700.000
Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)	Desa	16	5



Kebijakan : Pemantapan ketahanan pangan menuju Kedaulatan pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Strategi yang dilakukan :

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi
 - a) **Pengendalian konversi dan perluasan areal baru** terutama memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, dan memanfaatkan tumpang sari di lahan perkebunan;
 - b) **Peningkatan produktivitas** dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan; (ii) **Revitalisasi penyuluhan** sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan;
 - c) **Pengembangan pola produksi ramah lingkungan** dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik.
 - d) **Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen** dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi.
2. Pengembangan Desa Mandiri Benih, melalui bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung)

kebijakan : Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan luas tanam dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura terutama jagung, kedelai, cabai, bawang yang adaptif terhadap kondisi iklim

Produksi Pangan Lainnya

- a. **Peningkatan produksi daging sapi, kambing dan unggas** melalui: (i) penambahan populasi bibit induk sapi, (ii) pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan bibit induk sapi, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.



Produksi Perikanan

- a. **Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan** melalui: (i) peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap (*kampung Vaname, kampung Lele*); (ii) peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis; (vi) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan.
 - b. **Sarana Prasarana Pendukung Produksi**, dengan: (i) menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input, yang mencakup BBM, benih ikan berkualitas, pakan murah, obat-obatan, dan pakan berbasis bahan baku lokal (ii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting; (iii) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana penangkapan ikan
 - c. **Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan**, melalui: (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; (iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan/petambak garam/pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
3. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan, dilakukan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana alam dan perubahan iklim serta serangan organisme tanaman dan penyakit hewan, melalui : Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir, dan Pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*
 4. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan, dilakukan melalui :
Peningkatan kualitas distribusi: (i) peningkatan penyediaan dan sinergi fasilitas transportasi, penguatan sistem logistik untuk input produksi dan produk pangan, termasuk wilayah-wilayah terpencil dan rawan pangan; (ii) mendorong tersedianya lumbung pangan desa, waserda dan pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan perkembangan harga pangan dan pengendalian

- fluktuasi harga antara lain melalui operasi pasar; (iii) pemetaan dan membangun ketersambungan rantai pasok komoditi hasil pertanian dengan industri pangan (iv) pendataan daerah rawan pangan.
5. Perbaiki Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat, dilakukan melalui :
Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga melalui posyandu; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
 6. Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, serta membangun daerah irigasi baru.

Ketahanan Air

Ketahanan air adalah kondisi dari keterpenuhan air yang layak dan yang berkelanjutan untuk seluruh kehidupan, serta kemampuan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh air. Dengan demikian secara prinsip ketahanan air mencakup 2 (dua) hal yaitu: 1) keterpenuhan air secara layak baik kuantitas maupun kualitas dan berkelanjutan termasuk keberlanjutan bagi kehidupan dan ekosistemnya, dan 2) kemampuan mengurangi risiko daya rusak air. Mengingat air merupakan unsur penting dan strategis dalam mendukung kehidupan, maka dimensi ketahanan air harus mewadahi keseluruhan aspek kehidupan dan aspek kewilayahan. Oleh karena itu dimensi ketahanan air tersebut mencakup 5 (lima) dimensi, yaitu: 1) keterpenuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, 2) keterpenuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, 3) terpelihara dan terpulihkannya sumber air dan ekosistemnya, 4) ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, dan 5) kelembagaan dan tatalaksana yang mantap.

Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan pengelolaan sumberdaya air

Strategi : Peningkatan ketersediaan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat

Tabel 4.6
Sasaran Ketahanan Air

Uraian	2016	2018
1. Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif		
a.Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Permukaan	17.131 Ha	17.131
2. Mengurangi daya rusak air		
a.Panjang Pengaman pantai yang dibangun	405 Meter	737,37 meter



b. Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun	426,6 meter	500 meter
---	-------------	-----------

Kebijakan yang dilakukan adalah :

- a. Mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan.
- b. Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta solusi non struktural manajemen banjir antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan kawasan.
- c. Pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air bersih.
- d. Pengelolaan DAS Terpadu dengan peningkatan penanganan kualitas DAS di Provinsi Gorontalo
- e. Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, danau, muara sungai, pantai, dengan indikator membaiknya kualitas air di danau limboto dan 5 wilayah sungai.

4. Pembangunan Infrastruktur

Penguatan Konektivitas Daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka penguatan konektivitas daerah

Strategi :

1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.
2. Peningkatan keselamatan dan kemandirian transportasi untuk menuju zero accident.
3. Peningkatan layanan e-Government dan komunikasi informatika di daerah.
4. Penguatan terhadap Pengembangan infrastruktur nasional di daerah.

Kebijakan :

1. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata)
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi



3. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat.
4. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi)

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk Konektivitas Daerah

No	Pembangunan	Baseline (2016)	Sasaran (2018)
a.	Panjang jalan Provinsi yang dibangun/ditingkatkan (Km)	18,52	10 Km
b.	Panjang jalan Strategis Provinsi yang ditangani(Km)	16,54	10 KM
c.	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	41,15 %	60 %
d.	Pembangunan terminal tipe B	5 Terminal	6 Terminal
e.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas		
f.	Indeks E-Government	3,75	

5. Pembangunan Prasarana Dasar

Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan. Prioritas pembangunan infrastruktur/prasarana dasar tersebut diuraikan berikut ini.

Pembangunan Perumahan & Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi

Kebutuhan masyarakat akan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Khususnya bagi perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Untuk mencapai kualitas permukiman yang layak, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar bagi masyarakat mutlak diperlukan. Tantangan dalam penyediaan air minum dan sanitasi adalah memperluas akses dan menjamin keberlanjutan sarana prasarana yang terbangun.

Sasaran : Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, air minum dan sanitasi yang layak

Strategi : Peningkatan peran fasilitasi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dan Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.

Kebijakan : Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.



Tabel 4.8
Sasaran Prasarana Dasar

No	Pembangunan	Baseline (2016)	Sasaran (2018)
a.	Akses Air Minum Layak	69,56 %	70%
b.	Meningkatnya akses penduduk terhadap Sanitasi Layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	56,27 %	
c.	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan Rendah	3.897	
d.	Pembangunan SPAM di kawasan masyarakat berpenghasilan Rendah		
e.	Pembiayaan rumah murah	0	500 Unit

Pembangunan Ketenagalistrikan dan ESDM

Ketersediaan energi listrik menjadi mutlak dalam rangka untuk menunjang pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga terutama masyarakat miskin dan swasta. Sementara itu, provinsi Gorontalo yang punya potensi sumber daya mineral terutama emas juga perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal fasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pertambangan

Sasaran : Meningkatkan layanan akses universal energi listrik melalui strategi peningkatan jangkauan layanan ketenagalistrikan ke seluruh masyarakat dan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan produksi mineral.

Strategi : Peningkatan studi terhadap potensi energi baru dan terbarukan serta meningkatkan kapasitas listrik terpasang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan didaerah-daerah terpencil dan survey potensi dan pengelolaan sumberdaya mineral.

Tabel 4.9
Sasaran Energi Sumber Daya Minerla

Uraian	Baseline 2016	Sasaran 2018	Rata - Rata Pertumbuhan/tahun
Rasio Elektrifikasi	78,16%	84%	2.48%
Jumlah Listrik terpasang bagi RT Miskin		750 RTM	
Penyediaan jaringan listrik Desa	n/a	n/a	
Jumlah Usaha Pertambangan yang dibina		83 usaha	

Kebijakan :

Peningkatan survey potensi energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTMH, PLTS, PLTG), penyusunan studi dan kajian terhadap potensi energi dan meningkatkan kapasitas terpasang listrik bagi rumah tangga miskin dan memperluas wilayah cakupan transmisi listrik terutama didaerah - daerah terpencil.

6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Dalam era keterbukaan pasar global, menuntut pasar tenaga kerja yang berfungsi sempurna dan tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian serta siap untuk bekerja dalam bentuk kontrak maupun *part time*, hal ini merupakan peluang dalam meningkatkan daya saing. Mengantisipasi hal tersebut diperlukan penyiapan dan langkah-langkah strategis dalam memfasilitasi calon pekerja untuk merespon kebutuhan yang tersedia. Hal yang penting untuk dilakukan adalah meningkatkan keahlian pekerja. Program *link and match* harus sudah berjalan baik, sehingga institusi pendidikan/pelatihan dan industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat keterampilan yang sudah memadai. Lembaga pelatihan harus mampu berperan sebagai jembatan (*bridging*) diantara institusi pendidikan dan pelatihan industri. Kecenderungan yang semula berorientasi *supply driven* dan belum mengakomodasi kebutuhan sektor industri, akan berubah menjadi *demand driven*. Kompetensi tenaga kerja pada industri harus sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan

Sasaran : meningkatnya kualitas dan ketrampilan pekerja

Strategi : Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Kebijakan :

1. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri.
2. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis

Tabel 4.10
Sasaran Ketenagakerjaan

Uraian	Baseline 2016	Sasaran 2018	Rata - Rata Pertumbuhan/tahun
Persentase Angka Pengangguran Terbuka	2,76		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,89		
Meningkatnya jumlah Pekerja Formal	39,69		
Meningkatnya jumlah Pekerja informal	60,31		
Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	350 orang	240 orang yang dilatih, 300 orang magang	

7. Peningkatan Investasi

Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal



membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut. Pembentukan daya tarik investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, diyakini merupakan beberapa faktor kunci pembentuk daya tarik investasi suatu negara atau daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Gorontalo cukup punya potensi yang bisa jadi andalan dan dapat ditawarkan pada kalangan pelaku dunia usaha dari sisi sumber daya alamnya.

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan investasi di daerah dan membaiknya proses perizinan investasi

Strategi : Perbaiki Iklim Investasi dan Iklim Usaha dan Peningkatan Fasilitas Investasi

Kebijakan :

1. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha.
2. Pengembangan penyelenggaraan PTSP.
3. Promosi Investasi di daerah, melalui ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam yang up to date.

Tabel 4.11
Sasaran Peningkatan Investasi

Uraian	Baseline 2016	Sasaran 2018	Keterangan
Peningkatan Jumlah Investor berskala nasional (PMA / PMDN)	50	41	Rata - Rata 12 Perusahaan setiap Tahun
Peningkatan Jumlah nilai investasi (Rupiah)	4.145 Trilyun	6.358 Trilyun	Rata - rata pertumbuhan 17 % setiap tahun

8. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran : Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Strategi : Mendorong Peningkatan inovasi dan teknologi

Kebijakan :

1. Meningkatkan hasil - hasil riset pada bidang - bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek dan mengupayakan penyediaan sarana prasarana iptek.

4.3.2. Tata Kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Birokrasi dan tatakelola pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa birokrasi dengan tatakelola yang baik dan berkualitas memiliki korelasi yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan. Meskipun berbagai keberhasilan telah dicapai, ditinjau dari perkembangan lingkungan strategis baik domestik, internasional, dan kebutuhan pembangunan, kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Gorontalo khususnya masih memerlukan perbaikan.

Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.12
Sasaran Peningkatan Tata kelola Pemerintahan dan RB

No	Indikator	Baseline (2016)	Sasaran (2018)
a.	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP
b.	Tingkat maturitas SPIP	Level 2	
c.	Tingkat kualitas pelayanan public	Zona merah	Baik
d.	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Evaluasi LKIP)	CC	B
e.	Indeks Reformasi Birokrasi	Minimal Baik	Minimal Baik
f.	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat 10	Peringkat 10

Strategi dan Arah Kebijakan:

1. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi strategi yang akan ditempuh antara lain: pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan (*Grand Design* dan *Road Map*) yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi.

2. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif.

melalui pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain: penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; penerapan

teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

4. Penerapan *e-government* untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi.

Pengembangan *e-government* ditempuh melalui, antara lain: penguatan kebijakan *e-government*; penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM.

5. Peningkatan Kapasitas manajemen kinerja pembangunan

Melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; penguatan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.

6. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah

Melalui Pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama serta memperhatikan kesetaraan etnis serta keterwakilan dan partisipasi; Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; Penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; Penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

7. Membangun Kemitraan dan kerjasama

Dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; Membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional.

4.3.3 Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan kesejahteraan rakyat dimanifestasikan dalam bentuk, peningkatan kualitas SDM, penurunan kemiskinan dan peningkatan kebahagiaan. Meningkatnya kualitas SDM tercermin dari makin tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Gorontalo terus



mengalami peningkatan dari 64,70 pada tahun 2013 menjadi 65,17 pada tahun 2014. IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas selama 6,97 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 99,71 persen. Sementara itu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 68,24 tahun dan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar Rp. 25,1 juta. Persentase penduduk miskin sebesar 17,63 persen di tahun 2016.

1. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, sehingga terwujud SDM berkualitas dan produktif.

Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat

Tabel 4.13
Sasaran Peningkatan Derajat kesehatan dan Gizi masyarakat

No.	Indikator	Baseline 2016	Sasaran 2018
I	Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Anak		
	Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	301,7	
	Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	15,0	13
II	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		
	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	22,25	18
	Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)	33	28,8
III	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	Menurunnya prevalensi Tuberkulosis (Tb) per 100.000 penduduk	249	247
	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	29 (riskesdas 2013)	23,8
	Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	20%	30%
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	66%	80%
	Persentase penurunan laju pertumbuhan ; prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4%	15,4%
	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)	0,46	<0,05
	Persentase penurunan prevalensi merokok pada ≤ 18 tahun	40,4% (laki 75,2 dan wanita 5,5) (riskesdas 2013)	40%
IV	Meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan		
	Meningkatnya Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi	9	42
	meningkatnya akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	1	3
	meningkatnya pemerataan, mutu pelayanan penunjang medik, sarana prasarana dan peralatan kesehatan RS dan Labkesda	58,66	75
V	Meningkatnya Perlindungan Finansial		
	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang	219.249	209.000



	kesehatan (Jamkesta dan JKN)		
VI	Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	Persentase Kabupaten/kota yang 80% Puskesmasnya memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	2	24
	Jumlah RS Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	1	3

Strategi : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

Kebijakan :

1. **Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Keluarga, terutama Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas serta Pelayanan Gizi Masyarakat** melalui; Peningkatan akses dan mutu *continuum of care* pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan; Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita terutama di kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo yang angka kematian ibu cukup tinggi; serta Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia.
Pelayanan Gizi Masyarakat melalui Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan (ibu hamil hingga anak usia 2 tahun); Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan; Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (Posyandu dan Pos PAUD); Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.
2. **Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui:** (i) Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan termasuk mendorong pengalokasian dana desa 10 persen untuk kesehatan; (ii) Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat.
3. **Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,** melalui Peningkatan pelaksanaan STBM di kabupaten/Kota; Peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku *hygiene*; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.



4. **Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**, melalui Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit; Peningkatan upaya preventif dan promotif yang berkualitas dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan Pelayanan kesehatan jiwa.
 5. **Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta)**, melalui Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas pelayanannya
 6. **Meningkatkan Akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang Berkualitas** melalui: Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas dan jaringannya; Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta; Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan; Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.
Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui: Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan Provinsi, rumah sakit PONEK, rumah sakit pratama termasuk peningkatan rumah sakit di setiap kabupaten/kota.
 7. **Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan** melalui: Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan; Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer; Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan; serta Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
 8. **Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan** melalui: Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik;
 9. **Meningkatkan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan**
- 2. Kependudukan dan Keluarga Berencana**
- Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam jangka panjang mencapai angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1.
- Sasaran : Menurunnya angka kelahiran per perempuan usia reproduktif

Tabel 4.14
Sasaran Kependudukan dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Baseline 2016	Sasaran 2018
1.	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun		
2.	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>) semua cara	44	46

Strategi : Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas

Kebijakan :

1. Peningkatan pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB, dan peningkatan intensitas pelayanan KB statis dan pelayanan KB bergerak (*mobile*) khusus daerah sulit terjangkau;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan;
3. Peningkatan pelayanan KB (MKJP dan Non MKJP) pasca persalinan, pasca keguguran dan efek samping;
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
5. Peningkatan efektivitas advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)KB; dan Penguatan peran dan fungsi keluarga

3. Pendidikan

Salah satu hal penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia adalah pembangunan pendidikan. Membangun pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting untuk melahirkan SDM bermutu, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan

Tabel 4.15
Sasaran pembangunan Pendidikan

No	Indikator	Baseline 2016	Sasaran 2018
1.	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	76,13	77,2
2.	Angka Partisipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/Paket C	93,54	93,7
3.	Presentase APK SMA	n/a	47
4.	Presentase APM SMA	n/a	37,43
5.	Presentase APK SLB	n/a	2,55
6.	Presentase APK SMK	n/a	32,76
7.	Angka Partisipasi Sekolah	77,2	77,80
8.	Angka Putus Sekolah	0,01	0,01
9.	Presentase Sekolah yang memiliki kondisi baik	93,30	93,65
10.	Angka Melek Huruf	99,81	99,86



11.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,00	10,01
12.	Angka Kelulusan	100	100
13.	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah	26,51	26,7
14.	Rasio Guru terhadap Murid	1 : 15	1 : 16

Strategi : Memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, taraf pendidikan penduduk juga perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, menjamin kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kebijakan :

1. Meningkatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.
2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui: Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan kecamatan- yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, dengan pembangunan USB dan penambahan RKB; Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa.
3. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah dan memperluas akses masyarakat miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
4. Peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
5. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru.
6. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal, khususnya kursus-kursus-keterampilan bagi angkatan kerja muda.

4. Pemuda dan Olahraga

Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya budaya dan prestasi olahraga

Strategi :

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi

Kebijakan :

1. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama
2. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan

3. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga
5. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan.

Tabel 4.16
Sasaran Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Baseline 2016	Sasaran 2018
1.	Jumlah organisasi pemuda yang di bina		24
2.	Jumlah medali tertimbang olahraga pelajar tingkat nasional		12
3.	Jumlah klub olahraga pelajar berprestasi		3
4.	Presentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional		64
5.	Jumlah Organisasi Olahraga		35
6.	Jumlag atlet daerah yang dikirim ke event olahraga diluar negeri		9

5. Kebudayaan dan Keagamaan

Sasaran : Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan warisan budaya serta terciptanya kerukunan antar umat beragama

Strategi : Peningkatan penyelenggaraan seni budaya daerah dan event keagamaan.

Kebijakan :

1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya.
2. Pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.
3. Peningkatan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan langsung (hibah).

Tabel 4.17
Sasaran Pengembangan Budaya dan Agama

No	Indikator	Baseline 2016	Sasaran 2018
1.	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya gorontalo	n/a	9
2.	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya gorontalo yang tersimpan di museum	n/a	8
3.	Jumlah budaya tradisional gorontalo yang didokumentasikan dan tersimpan di Museum	n/a	6
4.	Jumlah situs budaya daerah	n/a	27
5.	Jumlah Benda yang terintegrasi di Museum	n/a	324
6.	Apresiasi seni budaya pada event regional, nasional dan intenasional	n/a	52

6. Penanggulangan Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan, termasuk perkembangan perekonomian nasional dan global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Hingga tahun 2016 persentase angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi, berada diangka 17,63 persen lebih tinggi dari persentase angka kemiskinan rata - rata nasional yang berada diangka 11,13 persen. Kondisi ini mengharuskan kerja keras dan upaya yang lebih sungguh - sungguh dari semua pihak terutama pemerintah daerah untuk merumuskan program - program penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat dan tepat sasaran melalui 4 (empat) klaster, yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil, dan program-program prorakyat.

Sasaran : Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 12,0 - 14,0 persen di tahun 2022

Strategi dan arah Kebijakan

1. **Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif**, Yaitu untuk: (i) peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; dan Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
2. **Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar**, melalui Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi) untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. **Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif**, Melalui Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan *supply chain* (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (*off-farm*) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

4.3.4 Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

Pembangunan wilayah diarahkan untuk percepatan pengembangan kawasan strategis termasuk pengembangan daerah transmigrasi dan percepatan pengembangan wilayah perdesaan.

Sasaran : Meningkatnya akses layanan publik dan ekonomi masyarakat di kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal

Tabel 4.18
Sasaran Pembangunan Perdesaan

No	Pembangunan	Baseline (2015)	Sasaran (2022)
a.	Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal)	103	50
b.	Jumlah Daerah Transmigrasi yang dikembangkan		

Strategi : Menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal.

Arah Kebijakan :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal, meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa.
4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di desa tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, air minum, dan telekomunikasi

Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Pertanahan

Rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan landasan utama dalam pembangunan wilayah provinsi, focus perhatian bidang tata ruang adalah untuk mewujudkan keserasian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga kemudian rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang,

kualitas rencana tata ruang, dan efektivitas penerapan serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Sementara itu pengelolaan pertanahan secara nasional, demikian halnya di daerah masih belum terarah dan masih ditandai oleh semakin meningkatnya kasus pertanahan. Tingginya angka kasus pertanahan tersebut menunjukkan belum baiknya pengelolaan/administrasi pertanahan yang dilakukan dan belum kuatnya kepastian hukum hak atas tanah.

Dalam pengelolaan bidang pertanahan saat ini diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan bidang pertanahan sebagai berikut: (i) Belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah; (ii) Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta masih rendahnya kesejahteraan masyarakat; (iii) Kinerja pelayanan pertanahan yang belum optimal; dan (iv) Belum terjaminnya ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Sasaran : Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian, Pemanfaatan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah yang Berkualitas dan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum.

Strategi : Peningkatan rencana tata ruang wilayah yang berkualitas, mendorong penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM Penataan ruang dan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum

Kebijakan :

1. Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas, Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Rencana melalui Penegakan Aturan Zonasi yang didukung oleh kelembagaan yang kuat dan SDM yang handal.
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum.

4.3.5 Agenda Pembangunan Lingkungan Hidup, Konservasi hutan dan Pengelolaan Bencana

Untuk menjaga kebersihan dan mencegah dampak limbah terhadap kualitas lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan pencemaran yang lebih intensif. Adanya berbagai polusi udara dan air memerlukan pengendalian pencemaran yang lebih keras lagi, baik pada tahap pemantauan, pengendalian pencemaran dan penegakan peraturan lingkungan. Kompetisi penggunaan lahan juga telah mengakibatkan degradasi hutan yang perlu diatasi bersama. Fungsi hutan sebagai penyerap pencemaran udara, sumber mata air dan habitat keanekaragaman hayati perlu dilindungi dan dilestarikan dengan baik. Selanjutnya, Gorontalo yang termasuk wilayah rentan bencana alam memerlukan langkah

mitigasi dan penanganan kebencanaan yang dapat melindungi kehidupan dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, diperlukan pembangunan dalam rangka: (i) menjaga kelestarian sumberdaya alam; (ii) peningkatan kualitas lingkungan; (iii) penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan di berbagai bidang dan kesejahteraan masyarakat.

1. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Hutan

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari dan berkelanjutan

Strategi : Peningkatan daya dukung, daya tampung dan pemanfaatan SDA berbasis lingkungan

Kebijakan :

1. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi.
2. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan.
3. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi sebesar 80,5 di tahun 2022.

Strategi : Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan.

Kebijakan :

1. **Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan**
2. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup** melalui, (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Penyelamatan danau Limboto (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (viii) pemantauan kualitas udara ambien Peningkatan tutupan lahan/hutan.



3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan daerah rawan bencana, kejadian bencana selalu menimbulkan risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi, dan akan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, apabila risiko bencana tersebut tidak dikelola.

Sasaran : Berkurangnya risiko dan kerugian ekonomi akibat bencana dan Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Strategi : Peningkatan daya dukung baik SDM maupun sarana prasarana penanggulangan bencana serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kebijakan :

1. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
2. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Memperkuat koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.4 Pengarusutamaan Pembangunan

Pengarusutamaan dalam pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan capaian dari hasil pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik

Good Governance atau penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah provinsi Gorontalo terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *culture set*. Sampai dengan tahun 2015 telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan pemerintah dan seluruh SKPD dalam menjabarkan rencana aksinya. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah, nasional dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Untuk itu, penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk (i) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public; (ii)



peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan disegala bidang; (iii) peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah; dan (iv) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.19
Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Kebijakan Instansi/SKPD	Indikator	Target
1.	meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi public	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi	% PPID di tingkat Provinsi	100 %
			Publikasi perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing	% SKPD yang mempublikasikan proses perencanaan & penganggaran kpd masyarakat	100%
2.	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan	Penciptaan ruang partisipasi dan konsultasi public	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan	% SKPD yang melaksanakan forum konsultasi public dalam proses perencanaan	100%
			Pengembangan website yang berinteraksi dgn masyarakat	SKPD yang memiliki website yang interaktif	100%
3.	meningkatnya kapasitas birokrasi	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Penyusunan Road Map reformasi birokrasi di SKPD	Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi SKPD/Instansi	100%
		Penataan penyelenggaraan fungsi layanan SKPD	Penyusunan SOP utama, khususnya yang terkait pelayanan kpd masyarakat	% SOP yang telah tersusun sesuai dengan proses bisnis SKPD/Unit kerja	100%
		Penerapan Sistem Pengendalian Internal	Percepatan penerapan SPIP disetiap SKPD	% SKPD yang menerapkan SPIP	100%
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan	Opini WTP	100%
			Penggunaan aplikasi Simda pada setiap SKPD	Opini WTP	
		Pengembangan dan penerapan e-	Pengembangan dan penerapan e-	Jumlah SKPD yang	100%



		Government	Government instansi	membangun dan menerapkan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan	
		Penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja aparatur	Penyusunan LAKIP yang berkualitas	Jumlah SKPD dengan Lakip yang memperoleh nilai B	100%
4.	meningkatnya kualitas pelayanan public	Penerapan standar pelayanan public pada unit pelayanan public	Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan	SKPD/Unit pelayanan public yang memiliki SOP	100%
		Penerapan pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan dan investasi	Percepatan penerapan pelayanan terpadu satu pintu yang efektif dan efisien	Jumlah layanan perizinan yang dikelola oleh PTSP Provinsi	100%

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan Amanah dalam pelaksanaan PUG oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6/2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dititikberatkan pada (i) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (ii) meningkatkan

perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; dan (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG di daerah.

Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah meningkatnya kesetaraan gender yang diukur dari meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

4.5 Pembangunan Lintas Bidang

Salah satu point penting dalam keberhasilan Pembangunan adalah bagaimana menciptakan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, diantara yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mengurangi permasalahannya, beberapa diantaranya adalah :

1. Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Hingga tahun 2016 persentase penduduk miskin di Gorontalo masih sebesar 17,63 persen, sejak tahun 2007 pemerintah berhasil menurunkan angka persentase kemiskinan dari sebesar 27,35 persen menjadi 17,33 ditahun 2012. Namun setelah itu persentase angka kemiskinan di Gorontalo sangat fluktuatif dan sulit beranjak dari angka 18 – 17 persen. Strategi yang dilakukan selama periode 2012 – 2017 melalui 4 (empat) program prioritas daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk penduduk menengah kebawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Pengurangan kemiskinan pada periode tersebut dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program, yakni 1) perlindungan social (jamkesta, prodira, PMKS), 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan 4) program pro rakyat.

Pendapatan perkapita masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ditahun 2015 sebesar Rp.263.652, dengan jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok pendapatan tersebut sebanyak 208.840 jiwa menurut data BPS. Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan menjadi penduduk berpendapatan terbawah tersebut adalah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu, termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan dan petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal dan buruh perkotaan, serta rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Sementara itu, laju pertumbuhan rumah tangga petani dan nelayan relatif tinggi dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi. Sehingga persoalan dalam pasar kerja berubah dari pengangguran terbuka menjadi setengah pengangguran. Permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi ini adalah semakin banyaknya tenaga kerja yang memiliki produktivitas kerja yang rendah, atau curahan waktu kerja di bawah jam kerja normal meningkat. Kondisi ini menghasilkan produktivitas sebagian dari rumah tangga menjadi rendah, yang ditandai dengan masa kerja yang tidak stabil. Rumah tangga

nelayan merupakan rumah tangga yang sangat rentan akan persoalan kemiskinan dan kurangnya produktivitas kerja.

Untuk menciptakan perbaikan terhadap fenomena tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang tinggi agar mampu mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja baru serta mengurangi permasalahan lain terkait ekonomi social masyarakat. Pertumbuhan inklusif merupakan salah satu syarat untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan. Pertumbuhan harus mampu mendorong pemerataan, dengan pola pertumbuhan yang memaksimalkan potensi ekonomi, pola pertumbuhan yang dapat menyertakan sebanyakbanyaknya angkatan ke dalam pasar tenaga kerja yang baik dan pola pertumbuhan yang ramah keluarga miskin. Standar hidup penduduk berpenghasilan rendah harus dapat ditingkatkan dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial. Akses yang sama juga harus tersedia untuk menunjang kegiatan ekonomi semua pelaku pembangunan. Dukungan terhadap perekonomian inklusif harus dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sector pembangunan, terutama sector yang menjadi potensi daerah seperti pertanian dan perikanan, serta terus mendorong berkembangnya sector industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor yang padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

2. Pembangunan Karakter Melalui Revolusi Mental

Dalam membangun sebuah daerah diperlukan upaya yang sistimatis dan komprehensif dalam pekerjaan pendidikan. Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari. Konsep ideal pendidikan ini menyentuh pikiran, akal budi, nilai-nilai, dan sikap mental setiap insan, dalam komunitas dan bangsa, yang harus dipupuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai sarana untuk membangun kebudayaan dan peradaban yang maju dan modern. Untuk mengawali pembangunan karakter masyarakat Gorontalo, maka yang utama adalah bagaimana pemerintah provinsi dapat menginternalisasi nilai-nilai revolusi mental kadalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam perumusan program-program penddidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.

4.6. Prioritas Pembangunan Daerah

Dari sasaran dan agenda pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pembangunan daerah diprioritaskan pada :



1. Pendidikan, yang difokuskan pada :

- a. Meningkatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.
- b. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui: Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, dengan pembangunan USB dan penambahan RKB; Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa.
- c. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah dan memperluas akses masyarakat miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
- d. Peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
- e. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru.

2. Kesehatan, diarahkan pada aspek:

- a. Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Keluarga, terutama Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas serta Pelayanan Gizi Masyarakat;
- b. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, melalui Peningkatan pelaksanaan STBM di kabupaten/Kota; Peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku *hygiene*; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja;
- d. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesda);
- f. Meningkatkan Akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang Berkualitas;
- g. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- h. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan;
- j. Meningkatkan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan.

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, akan diupayakan melalui:

- a. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
- b. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;



- c. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;
- d. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi);
- e. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan perikanan;
- f. Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan energy ketenagalistrikan;
- g. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.

4. Peningkatan Ekonomi, akan didorong melalui :

- a. Penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan komoditi pertanian dan perikanan;
- b. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
- c. Pembangunan pariwisata, melalui peningkatan promosi pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata serta memperkuat kelembagaan pariwisata;
- d. Meningkatkan ketahanan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan air;
- e. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
- f. Peningkatan Pertumbuhan investasi di daerah dan membaiknya proses perizinan investasi;
- g. Penanggulangan Kemiskinan melalui Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar, dan Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

5. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah, akan didorong melalui:

- a. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi strategi yang akan ditempuh antara lain: pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan (*Grand Design* dan *Road Map*) yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi.
- b. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif. melalui pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain: penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

6. Pengembangan Budaya dan Keagamaan, dilakukan melalui:

- a. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya.
- b. Pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Peningkatan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan langsung (hibah).

7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan;
- b. Menjaga kualitas lingkungan hidup (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (viii) pemantauan kualitas udara ambien Peningkatan tutupan lahan/hutan.

4.7 Isu Strategis

Berdasarkan sasaran, agenda dan prioritas pembangunan yang dikemukakan diatas dan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang diuraikan pada BAB II, maka isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. **Pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan** melalui transformasi struktur ekonomi daerah dari kondisi pembangunan ekonomi yang kurang efisien menjadi lebih efisien dengan peningkatan produktivitas di semua bidang; dari pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat di perkotaan bisa tersebar merata di perdesaan; dari struktur ekonomi yang mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam menjadi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi; dari ekonomi berbasis komoditi sektor primer bisa digeser kearah ekonomi jasa dan ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi maritim dan lain-lain;

2. **Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui revolusi mental.**
3. **Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan air.** Kedua sektor strategis ini yaitu pangan, dan air di masa yang akan datang akan semakin penting mengingat kebutuhan yang terus meningkat, sementara ketersediaannya relatif tetap, bahkan menurun;
4. **Pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis** pendukung sektor pembangunan ekonomi yang perlu menjadi prioritas daerah mengingat rendahnya daya saing Gorontalo yang salah satunya ditentukan oleh masalah penyediaan infrastruktur yang kurang memadai;
5. **Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia** dalam rangka meningkatkan daya saing dan menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan adanya Asean Economic Community (AEC) yang berlaku mulai akhir tahun 2015;
6. **Penanggulangan kemiskinan** yang sampai saat ini masih cukup tinggi persentasenya dan Pemerataan pendapatan yang selama beberapa tahun terakhir memburuk karena kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk miskin;
7. **Menjaga kelangsungan lingkungan hidup dan hutan dan penanggulangan bencana alam;**
8. **Pembangunan wilayah dan perdesaan,** meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik seperti akses pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja; dan
9. **Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah serta menjaga nilai-nilai kehidupan beragama.**

4.8 Prioritas Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di tahun 2018 dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian utama sebagai berikut.



Tabel 4.20
Program Prioritas Provinsi Tahun 2018

Isu Strategis	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
Pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan		
1.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Dinas Pertanian
2.	Program Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Pertanian	Dinas Pertanian
3.	Program pengembangan industri kecil menengah	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
4.	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Perikanan Kelautan
5.	Program penyediaan sarana prasarana perbenihan	Dinas Perikanan Kelautan
6.	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kelautan
7.	Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
8.	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
9.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
10.	Program Peningkatan Produktifitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
11.	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Lokal	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
12.	Program pengembangan perdagangan dalam negeri	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
13.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata
14.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
15.	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
16.	Program pengembangan promosi seni budaya pariwisata	Dinas Pariwisata
17.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
18.	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Isu Peningkatan ketahanan pangan, dan ketahanan air		
1.	Program Perluasan Areal Pertanian	Dinas Pertanian
2.	Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Program Penanganan Pasca Panen komoditi pertanian	Dinas Pertanian
4.	Program Desa Mandiri Benih	Dinas Pertanian



5.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian
6.	Program Pengembangan peternakan	Dinas Pertanian
7.	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan
10.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pangan
11.	Program pengelolaan air irigasi untuk pertanian	Dinas Pertanian
12.	Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa dan Tambak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Program Penyelidikan dan Pelayanan Air Tanah	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Isu Pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis		
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi	Dinas Perhubungan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Transportasi	Dinas Perhubungan
4.	Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan transportasi	Dinas Perhubungan
5.	Program Pengembangan aplikasi Informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
6.	Program pengelolaan pertanahan daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Program Sarana dan Prasarana Utilitas Umum kawasan permukiman dan kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Isu Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia		
1.	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
2.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
4.	Program Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan
5.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Fasyankes	Dinas Kesehatan
6.	Program Jamkesta	Dinas Kesehatan
7.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS	Dinas Kesehatan
8.	Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Penguatan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
9.	Program Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



10.	Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
11.	Program Pendidikan Untuk Rakyat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
12.	Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
13.	Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
14.	Program pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
15.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
16.	Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
17.	Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
18.	Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
19.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
20.	Program Penempatan dan Perluasan kesempatan Tenaga Kerja	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Isu Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui revolusi mental.		
1.	Program Pemberantasan dan pencegahan korupsi, pengawasan atas akuntabilitas kinerja dan keuangan, penyelenggaraan reformasi birokrasi	Inspektorat
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
3.	Program Pendidikan Kedinasan	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
6.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum dan Organisasi
7.	Program Pengendalian Pembangunan	Biro Pengendalian Pembangunan Dan Pengadaan
8.	Program peningkatan layanan pengadaan	Biro Pengendalian Pembangunan Dan Pengadaan
9.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kantor Satpol PP & Badan Kesbangpol
10.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol
11.	Program Pendidikan Politik	Badan Kesbangpol
12.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Setda, Badan Penghubung
13.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
Isu Penanggulangan kemiskinan		
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan anak
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan anak

3.	Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan anak
4.	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan anak
5.	Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan anak
6.	Program Jamkesta	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7.	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman
8.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Program Penyediaan perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman
10.	Pengembangan Infrastruktur Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Program Pembiayaan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (listrik murah bagi MBR)	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
13.	Program Pendidikan Untuk Rakyat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
14.	Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Perikanan dan Kelautan
16.	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan	Dinas koperasi UMKM, perindustrian & Perdagangan
Isu Menjaga kelangsungan lingkungan hidup dan hutan dan penanggulangan bencana alam		
1.	Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
	Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Isu Pembangunan wilayah dan perdesaan		
1.	Program penyelenggaraan jalan (akses pendidikan, kesehatan, ekonomi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Program pengembangan destinasi pariwisata (Desa Wisata)	Dinas Pariwisata
3.	Program dukungan perluasan akses dan produksi sektor pertanian dan perikanan	Dinas Pertanian



4.	Program Pengembangan Transmigrasi	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
5.	Program Pengembangan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil
6.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil
7.	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan serta Kawasan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil
Isu Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah serta menjaga nilai-nilai kehidupan beragama		
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	Program Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3.	Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Adat dan Budaya	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian

Program prioritas daerah Provinsi Gorontalo juga mendukung sasaran pembangunan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagaimana persandingan yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.21
Program Prioritas Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi
1.	Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Pendidikan Untuk Rakyat 4. Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan 5. Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 6. Program pendidikan Non Formal 7. Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.	Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 4. Program Surveilans dan Imunisasi 5. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Fasyankes 6. Program Jamkesta 7. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS 8. Program Advokasi, Komunikasi, Informasi



		dan Edukasi Penguatan Keluarga Berencana
3.	Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Perumahan2. Program Penyediaan perumahan3. Pengembangan Infrastruktur Perumahan4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.	Revolusi Karakter Bangsa	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan Politik
5.	Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat restorasi sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6.	Revolusi Mental	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan Dasar2. Program Pendidikan Menengah3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual PNS)
7.	Kedaulatan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Perluasan Areal Pertanian2. Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi3. Program Penanganan Pasca Panen komoditi pertanian4. Program Desa Mandiri Benih5. Program Peningkatan Produksi Pertanian6. Program Pengembangan peternakan7. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya8. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap9. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir10. Program peningkatan diversifikas dan ketahanan pangan masyarakat11. Program pengelolaan air irigasi untuk pertanian12. Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa dan Tambak
8.	Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
9.	Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir4. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
10.	Industri	<ol style="list-style-type: none">1. Program pengembangan industri kecil menengah2. Program Pengembangan Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif
11.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



		<ol style="list-style-type: none">3. Program Pengembangan seni budaya daerah4. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat & Budaya
12.	Inovasi dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Riset Daerah2. Program Penanganan Pasca Panen komoditi pertanian3. Program Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi



BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 ini, rencana program yang disajikan adalah program prioritas setiap SKPD yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan utama dan potensi daerah dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2018 - 2022.

Untuk itu, diharapkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Gorontalo dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 mengacu pada program prioritas sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1 yang menjadi lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 ini.



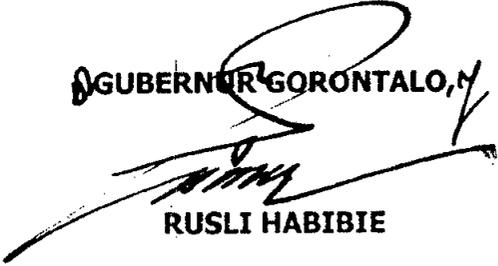
BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan dokumen tahun pertama dalam periodisasi RPJMD 2018 – 2022, yang mana RPJMD dimaksud akan menjadi tahap ketiga dalam periode RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2022. Dalam menyiapkan kekosongan tahun rencana pembangunan disebabkan berakhirnya RPJMD periode 2012 – 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Bappeda telah menginisiasi penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2018 – 2022 yang mengacu pada RPJPD 2007 – 2025 dan RPJMN 2015 – 2019, hal ini dilakukan dalam rangka menyajikan acuan yang tepat dalam penyusunan RKPD tahun 2018.

Perumusan RKPD tahun 2018 didasarkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan RPJPD.

Dengan demikian, maka RKPD tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan transisi yang menjembatani RPJMD periode kedua tahun 2012-2017 dengan RPJMD periode ketiga tahun 2018-2022 yang masuk dalam periodisasi RPJPD tahun 2007 – 2025. Sebagai RKPD pertama dalam periode RPJMD 2018 - 2022, maka RKPD 2018 cenderung memuat prioritas pembangunan berdasarkan permasalahan utama daerah dan potensi daerah yang akan dikembangkan dalam rangka mempersiapkan pijakan awal untuk memudahkan kepala daerah terpilih dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

TABEL 5.1
Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Kode	Program/Kegiatan	Indikator		Tahun 2018 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program pendidikan Non Formal	Menurunnya angka tuna aksara			Rp 10,069,000,000				11,273,256,250
	Pelaksanaan layanan pendidikan keaksaraan dasar orang dewasa	Menurunnya angka Buta Aksara	Kab/Kota	2500 Org	Rp 350,000,000			2500 Org	402,500,000
	Pelaksanaan layanan pendidikan setara sekolah dasar orang dewasa	Jumlah pelaksanaan layanan pendidikan setara sekolah dasar orang dewasa	Kab/Kota	Paket A : 12 Lmbga/200 Org	Rp 1,094,000,000			Paket A : 12 Lmbga/200 Org	1,258,100,000
				Paket B : 13 Lmbga/650 Org				Paket B : 13 Lmbga/650 Org	
	Pelaksanaan Layanan Pendidikan sekolah menengah dan vokasional orang dewasa	Jumlah Orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan sekolah menengah dan vokasional orang dewasa		3500 Org				3500 Org	
	- Paket C Vokasional untuk orang dewasa	Jumlah orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan vokasi (Paket C)		Kota Gtlo : 200 Org	Rp 350,000,000			Kota Gtlo : 200 Org	402,500,000
				Kab.Gtlo : 350 Org	Rp 612,500,000			Kab.Gtlo : 350 Org	718,156,250
				Kab. Boalemo : 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Boalemo : 300 Org	615,562,500
				Kab. Bonbol : 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Bonbol : 300 Org	615,562,500
				Kab. Pohwto : 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Pohwto : 300 Org	615,562,500
				Kab. Gorut 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Gorut 300 Org	615,562,500
	- Paket C Reguler	Jumlah orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan menengah (Paket C)		Kota Gtlo : 200 Org	Rp 350,000,000			Kota Gtlo : 200 Org	410,375,000
				Kab.Gtlo : 350 Org	Rp 612,500,000			Kab.Gtlo : 350 Org	704,375,000
				Kab. Boalemo : 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Boalemo : 300 Org	603,750,000
				Kab. Bonbol : 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Bonbol : 300 Org	603,750,000
				Kab. Pohwto : 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Pohwto : 300 Org	603,750,000
				Kab. Gorut 300 Org	Rp 525,000,000			Kab. Gorut 300 Org	603,750,000

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2018 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Indikator	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		Kinerja Program /Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Kemampuan Literasi Masyarakat	Menurunnya angka tuna aksara	Kab/Kota	Buta Aksara : 2122 Orang Kota Gorontalo : 0 Orang Kab. Gorontalo : 650 Orang Kab. Boalemo : 300 Orang Kab. Pohuwato : 500 Orang Kab. Bone Bolango : 352 Orang Kab. Gorontalo Utara : 320 Orang KUM : 7500 Orang Kota Gorontalo : 280 Orang Kab. Gorontalo : 2660 Orang Kab. Boalemo : 870 Orang Kab. Pohuwato : 2060 Orang Kab. Bone Bolango : 950 Orang Kab. Gorontalo Utara : 680 Orang BAN PNF : 60 Lembaga PAUD : 15 Lembaga LKP : 20 Lembaga PKBM : 25 Lembaga Life Skill : 800 Orang Kota Gorontalo : 100 Orang Kab. Gorontalo : 180 Orang Kab. Boalemo : 140 Orang Kab. Pohuwato : 140 Orang Kab. Bone Bolango : 130 Orang Kab. Gorontalo Utara : 110 Orang	Rp 2,500,000,000				2,500,000,000
2	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan	Prov. Gorontalo	- 1.255 Satuan Pendidikan - 6 Dinas Pendidikan Kabupaten/kota - Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, 6 kegiatan	Rp 1,215,575,000				1,397,911,250
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP	Jumlah siswa SD,SMP yang mengikuti seleksi O2SN di Tingkat Provinsi	Prov. Gtlo	132 Siswa SD dan SMP	Rp 387,215,000			132 Siswa SD dan SMP	445,297,250
	- O2SN SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti seleksi O2SN di Tingkat Provinsi		72 Siswa (PA/PI) untuk 6 cabang olahraga utusan 6 kab/kota				72 Siswa (PA/PI) untuk 6 cabang olahraga utusan 6 kab/kota	
	- O2SN SMP	Jumlah siswa SMP yang mengikuti seleksi O2SN di Tingkat Provinsi		60 Siswa (PA/PI) untuk 5 cabang olahraga utusan 6 kab/kota				60 Siswa (PA/PI) untuk 5 cabang olahraga utusan 6 kab/kota	
	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP	Jumlah siswa SD,SMP yang mengikuti seleksi FLS2N di Tingkat Provinsi	Prov.Gtlo	114 Peserta SD dan SMP	Rp 604,685,000			114 Peserta SD dan SMP	695,387,750
	- FLS2N SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti seleksi FLS2N di Tingkat Provinsi		36 Siswa untuk 4 cabang lomba utusan 6 kab/kota				36 Siswa untuk 4 cabang lomba utusan 6 kab/kota	
	- FLS2N SMP	Jumlah siswa SMP yang mengikuti seleksi FLS2N di Tingkat Provinsi		78 Siswa untuk 5 cabang lomba utusan 6 kab/kota				78 Siswa untuk 5 cabang lomba utusan 6 kab/kota	
	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD, SMP	Jumlah siswa SD, SMP dan Lomajari yang mengikuti seleksi OSN di Tingkat Provinsi	Prov. Gtlo	90 Siswa untuk 2 Mata Pelajaran	Rp 223,675,000			90 Siswa untuk 2 Mata Pelajaran	257,226,250
	- OSN SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti seleksi OSN di Tingkat Provinsi		36 Siswa untuk 2 Mata Pelajaran utusan 6 kab/kota				36 Siswa untuk 2 Mata Pelajaran utusan 6 kab/kota	
	- OSN SMP	Jumlah siswa SMP yang mengikuti seleksi OSN di Tingkat Provinsi		54 Siswa untuk 3 Mata Pelajaran utusan 6 kab/kota				54 Siswa untuk 3 Mata Pelajaran utusan 6 kab/kota	
3	Program Perluasan Akses Pendidikan Menengah dan DIKSUS	Meningkatnya APK dan APM SMA/SMK/Dikus			44,205,000,000				51,700,830,000
	Peningkatan Akses Layanan SMA	Jumlah USB/Lab/Alat Praktek/Asrama	Kab/Kota						

Kode	Program/Kegiatan	Indikator		Tahun 2018 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Unit Sekolah Baru	Kec. Bulawa Dan Kec. Tilog Kabila	2 Unit Sekolah Baru	Rp 4,000,000,000			2 Unit Sekolah Baru	4,600,000,000
		Jumlah Unit Sekolah Baru	Desa Labanu Kec. Tibawa	1 Unit Sekolah Baru	Rp 2,000,000,000			1 Unit Sekolah Baru	2,300,000,000
		Jumlah Unit Sekolah Baru	Kab. Gorut	1 Unit Sekolah Baru	Rp 2,000,000,000			1 Unit Sekolah Baru	2,300,000,000
		Jumlah Unit Sekolah Baru	Kec. Randangan	1 Unit Sekolah Baru	Rp 2,000,000,000			1 Unit Sekolah Baru	2,300,000,000
	- Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium	SMAN 2 Gtlo	1 Ruang Laboratorium	Rp 245,000,000			1 Ruang Laboratorium	281,750,000
		Jumlah Laboratorium	SMAN 1 Limbot, SMAN 1 Tibawa, & SMAN 1 Dungalo	3 Ruang Laboratorium	Rp 735,000,000			3 Ruang Laboratorium	845,250,000
		Jumlah Laboratorium	SMA 1 Paguyaman, SMA 1 Paguyaman Pantai, SMA 1 Botumoito, dan SMA 1 mananggu	4 Ruang Laboratorium	Rp 980,000,000			4 Ruang Laboratorium	1,127,000,000
		Jumlah Laboratorium	SMA 1 Popayato Barat, SMA 1 Marisa, SMA 1 Buntulia, SMA 1 Lemito & SMA Paguat	5 Ruang Laboratorium	Rp 1,225,000,000			5 Ruang Laboratorium	1,408,750,000
		Jumlah Laboratorium	SMA 1 BonePantai, SMA Bone, & SMA Suwawa Timur	3 Ruang Laboratorium	Rp 735,000,000			3 Ruang Laboratorium	845,250,000
		Jumlah Laboratorium	SMA 9 Sumalata Timur, SMA 10 Biawu, Dan SMA 7 Gorut	3 Ruang Laboratorium	Rp 735,000,000			3 Ruang Laboratorium	845,250,000
	- Pembangunan RKB	Jumlah RKB	SMA 5 Gorontalo	2 RKB	Rp 420,000,000				483,000,000
		Jumlah RKB	SMA Bilato	1 RKB	Rp 210,000,000				241,500,000
		Jumlah RKB	SMA Bongomeme	1 RKB	Rp 210,000,000				241,500,000

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2018 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Indikator	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
		Kinerja Program /Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah RKB	SMA Pulubala	1 RKB	Rp 210,000,000				241,500,000
	- Meubiler	Jumlah Meubiler	SMA 5 Gorontalo	2 Meubiler	Rp 60,000,000				69,000,000
			SMA Bilato	1 Meubiler	Rp 30,000,000				34,500,000
			SMA Bongomeme	1 Meubiler	Rp 30,000,000				34,500,000
			SMA Pulubala	1 Meubiler	Rp 30,000,000				34,500,000
	- Revitalisasi/Rehab		SMAN Dungaliyo	1 Paket					
			SMAN 1 Tilamuta	1 Paket					
			SMAN 3 Gorut	1 Paket					
			SMAN 5 Gorut	1 Paket					
	- Penyediaan Media Pembelajaran dan Peralatan/Alat Praktek Sekolah	- Jumlah Media Pembelajaran dan Peralatan/Alat Praktek Sekolah Yang Tersedia	Kota Gorontalo	5 Paket Untuk 5 Sekolah	Rp 500,000,000			5 Paket Untuk 5 Sekolah	575,000,000
		- Jumlah Media Pembelajaran dan Peralatan/Alat Praktek Sekolah Yang Tersedia	Kab. Gorontalo	16 Paket Untuk 16 Sekolah	Rp 1,600,000,000			16 Paket Untuk 16 Sekolah	1,840,000,000
		- Jumlah Media Pembelajaran dan Peralatan/Alat Praktek Sekolah Yang Tersedia	Kab. Boalemo	9 paket untuk 9 Sekolah	Rp 900,000,000			9 paket untuk 9 Sekolah	1,035,000,000
		- Jumlah Media Pembelajaran dan Peralatan/Alat Praktek Sekolah Yang Tersedia	Kab. Pohuwato	7 Paket Untuk 7 Sekolah	Rp 700,000,000			7 Paket Untuk 7 Sekolah	805,000,000
		- Jumlah Media Pembelajaran dan Peralatan/Alat Praktek Sekolah Yang Tersedia	Kab. Bonjol	8 Paket Untuk 8 Sekolah	Rp 800,000,000			8 Paket Untuk 8 Sekolah	920,000,000
		- Jumlah Media Pembelajaran dan Peralatan/Alat Praktek Sekolah Yang Tersedia	Kab. Gorut	10 Paket Untuk 10 Sekolah	Rp 1,000,000,000			10 Paket Untuk 10 Sekolah	1,150,000,000
	- Boarding School SMA	Jumlah Siswa Boarding School SMA	SMAN 3 Kota Gorontalo	240 Siswa	Rp 1,200,000,000			240 Siswa	1,380,000,000
	Peningkatan Akses Layanan SMK	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah	Kab./Kota	30 (RPS) dan 27 Paket (Peralatan)				30 (RPS) dan 27 Paket (Peralatan)	
	- Ruang Praktek Siswa (RPS)/Display	Jumlah RPS/Display	Kota Gorontalo	- SMKN 4 Gorontalo (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 5Gorontalo (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
			Kab. Gorontalo	- SMKN 1 Batudaa (1 Paket)	Rp 648,000,000				856,980,000

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2018 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Indikator	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- SMKN 1 Dungaliyo(1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN Rintisan Tibawa(4 RPS)	Rp 1,296,000,000				1,713,960,000
				- SMKN 2 Limboto (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 2 Pulubala (2 RPS)	Rp 648,000,000				856,980,000
			Kab. Boalemo	- SMKN 2 Paguayaman (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 1 Wonosari (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 1 Boalemo (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 1 Dulupi (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 3 Paguayaman (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
			Kab. Pohuwato	- SMKN 1 Dengilo (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 1 Duhiadaa (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 1 Popayato Timur (2 RPS)	Rp 648,000,000				842,400,000
			Kab. Bone Bolango	- SMKN 1 Bulango Selatan(2 RPS)	Rp 648,000,000				842,400,000
				- SMKN 1 Bulango Utara (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 1 Suwawa (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 1 Bone Raya (2 RPS)	Rp 648,000,000				856,980,000
			Kab. Gorontalo Utara	- SMKN 2 Gorut (1 RPS)	Rp 324,000,000				372,600,000
				- SMKN 3 Gorut (2 RPS)	Rp 648,000,000				856,980,000
	- Peralatan	Jumlah Peralatan	Kota Gorontalo	SMKN 1 Gorontalo	Rp 200,000,000				230,000,000
				SMKN 2 Gorontalo	Rp 350,000,000				402,500,000

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2018 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019					
		Indikator	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif				
		Kinerja Program /Kegiatan								3	4	5	6
					SMKN 5 Gorontalo	Rp	250,000,000						287,500,000
					SMK Kesehatan Bhakti Nusantara	Rp	125,000,000						143,750,000
			Kab. Gorontalo		SMKN 1 Limboto	Rp	500,000,000						575,000,000
					SMK Rintisan Tibawa	Rp	450,000,000						517,500,000
					SMK Almamater Telaga	Rp	150,000,000						172,500,000
					SMK Teknologi Muh Limboto	Rp	100,000,000						115,000,000
					SMK Cendekia Boliyohuto	Rp	100,000,000						115,000,000
			Kabupaten Boalemo		SMKN 1 Paguyaman	Rp	150,000,000						172,500,000
					SMKN 2 Paguyaman	Rp	150,000,000						172,500,000
					SMKN 3 Paguyaman	Rp	200,000,000						230,000,000
					SMKN 2 Wonosari	Rp	150,000,000						172,500,000
					SMKN Mananggu	Rp	150,000,000						172,500,000
			Kabupaten Pohuwato		SMKN 1 Patilanggio	Rp	150,000,000						172,500,000
					SMKN 1 Wanggarasi	Rp	150,000,000						172,500,000
					SMK Salafiyah Syafiyah	Rp	130,000,000						149,500,000
					SMK Kesehatan Randangan	Rp	100,000,000						115,000,000
					SMK Popayato Timur	Rp	200,000,000						230,000,000
			Kabupaten Bone Bolango		SMKN Bone Raya	Rp	150,000,000						172,500,000
					SMKN 1 Bone Pantai	Rp	125,000,000						143,750,000
					SMKN 1 Suwawa	Rp	150,000,000						172,500,000
			Kabupaten Gorontalo Utara		SMKN 1 Gorontalo Utara	Rp	150,000,000						172,500,000

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2018 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Indikator	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		Kinerja Program /Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SMKN 2 Gorontalo Utara	Rp 150,000,000				172,500,000
				SMKN 3 Gorontalo Utara	Rp 350,000,000				402,500,000
				SMK Taruna Bahari	Rp 200,000,000				230,000,000
				SMK Kesehatan Muh. Gorut	Rp 250,000,000				287,500,000
	Peningkatan Akses Layanan DIKSUS	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Khusus	Kab/Kota						
	- Pembangunan Asrama Siswa	Jumlah Asrama Siswa	Kota Gorontalo	2 Gedung	Rp 1,200,000,000			2 Gedung	1,380,000,000
		Jumlah Asrama Siswa	Kab. Gorontalo	1 Gedung	Rp 600,000,000			1 Gedung	690,000,000
		Jumlah Asrama Siswa	Kab. Boaiemo	1 Gedung	Rp 600,000,000			1 Gedung	690,000,000
		Jumlah Asrama Siswa	Kab. Pohuwato	2 Gedung	Rp 1,200,000,000			2 Gedung	1,380,000,000
		Jumlah Asrama Siswa	Kab. Bonbol	2 Gedung	Rp 1,200,000,000			2 Gedung	1,380,000,000
		Jumlah Asrama Siswa	Kab. Gorut	1 Gedung	Rp 600,000,000			1 Gedung	690,000,000
	- Pembangunan Ruang Praktek Siswa	Jumlah Ruang Praktek Siswa	Kota Gorontalo	1 Ruang	Rp 250,000,000			1 Ruang	287,500,000
		Jumlah Ruang Praktek Siswa	Kab. Boalemo	2 Ruang	Rp 500,000,000			2 Ruang	575,000,000
		Jumlah Ruang Praktek Siswa	Kab. Pohuwato	1 Ruang	Rp 250,000,000			1 Ruang	287,500,000
		Jumlah Ruang Praktek Siswa	Kab. Bonbol	1 Ruang	Rp 250,000,000			1 Ruang	287,500,000
4	Program Pendidikan Untuk Rakyat	Meningkatnya Akses pada jenjang pendidikan menengah			Rp 30,050,000,000				34,557,500,000
	Bantuan Operasional SMA	Jumlah Siswa Penerima Operasional	Kota Gorontalo	4.633 Siswa	Rp 2,316,500,000			4.633 Siswa	2,663,975,000
			Kab. Gorontalo	8.023 Siswa	Rp 4,011,500,000			8.023 Siswa	4,613,225,000
			Kab. Boalemo	3.151 Siswa	Rp 1,575,500,000			3.151 Siswa	1,811,825,000
			Kab. Pohuwato	3.396 Siswa	Rp 1,698,000,000			3.396 Siswa	1,952,700,000
			Kab. Bone Bolango	3.248 Siswa	Rp 1,624,000,000			3.248 Siswa	1,867,600,000

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2018 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Indikator	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		Kinerja Program /Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Gorut	3.751 Siswa	Rp 1,875,500,000			3.751 Siswa	2,156,825,000
	Bantuan Operasional SMK	Jumlah Siswa Penerima Operasional	Kota Gorontalo	6400 Siswa	Rp 4,800,000,000			6400 Siswa	5,520,000,000
			Kab. Gorontalo	5150 Siswa	Rp 3,862,500,000			5150 Siswa	4,441,875,000
			Kab. Boalemo	2500 Siswa	Rp 1,875,000,000			2500 Siswa	2,156,250,000
			Kab. Pohuwato	2100 Siswa	Rp 1,575,000,000			2100 Siswa	1,811,250,000
			Kab. Bone Bolango	2600 Siswa	Rp 1,950,000,000			2600 Siswa	2,242,500,000
			Kab. Gorut	1050 Siswa	Rp 787,500,000			1050 Siswa	905,625,000
	Bantuan Operasional DIKSUS		Kota Gorontalo	211 Siswa	Rp 105,500,000			211 Siswa	121,325,000
			Kab. Gorontalo	166 Siswa	Rp 83,000,000			166 Siswa	95,450,000
			Kab. Boalemo	136 Siswa	Rp 68,000,000			136 Siswa	78,200,000
			Kab. Pohuwato	108 Siswa	Rp 54,000,000			108 Siswa	62,100,000
			Kab. Bone Bolango	181 Siswa	Rp 90,500,000			181 Siswa	104,075,000
			Kab. Gorut	96 Siswa	Rp 48,000,000			96 Siswa	55,200,000
	Manajemen Prodira	Tersedianya Manajemen Prodira	Prov. Gorontalo	2472 Orang	Rp 1,650,000,000			2472 Orang	1,897,500,000
5	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya kualitas dan relevansi layanan pendidikan Menengah (% kelulusan UN SMA/MA/SMK)			Rp 26,183,946,500				30,111,538,475
	Peningkatan Prestasi Siswa SMA	Jumlah siswa yang ditingkatkan prestasi	Prov. Gorontalo	-Siswa SMA Dwiwarna : 8 org	Rp 2,046,297,000			-Siswa SMA Dwiwarna : 8 org	2,353,241,550
				Siswa MAN Insan Cendekia : 70 Org				Siswa MAN Insan Cendekia : 70 Org	
				Siswa SMA Wira Bhakti : 12 Org				Siswa SMA Wira Bhakti : 12 Org	
				Clinical : 729 Org				Clinical : 729 Org	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator		Tahun 2018 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lomba Cerdas Cermat SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SMA	Kab/Kota	Kota Gorontalo : 30 Org	Rp 529,667,000			Kota Gorontalo : 30 Org	609,117,050
				Kab. Gorontalo : 30 Org				Kab. Gorontalo : 30 Org	
				Kab. Boalemo : 30 Org				Kab. Boalemo : 30 Org	
				Kab. Pohuwato : 30 Org				Kab. Pohuwato : 30 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 30 Org				Kab. Bone Bolango ; 30 Org	
				kab. Gorontalo Utara : 30 Org				kab. Gorontalo Utara : 30 Org	
	Lomba Debat Bahasa SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa SMA	Kab/Kota	Kota Gorontalo : 12 Org	Rp 200,000,000			Kota Gorontalo : 12 Org	230,000,000
				Kab. Gorontalo : 12 Org				Kab. Gorontalo : 12 Org	
				Kab. Boalemo : 12 Org				Kab. Boalemo : 12 Org	
				Kab. Pohuwato : 12 Org				Kab. Pohuwato : 12 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 12 Org				Kab. Bone Bolango ; 12 Org	
				kab. Gorontalo Utara : 12 Org				kab. Gorontalo Utara : 12 Org	
	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains nasional SMA	Kab/Kota	Kota Gorontalo : 216 Org	Rp 225,000,000			Kota Gorontalo : 216 Org	258,750,000
				Kab. Gorontalo : 540 Org				Kab. Gorontalo : 540 Org	
				Kab. Boalemo : 216 Org				Kab. Boalemo : 216 Org	
				Kab. Pohuwato : 216 Org				Kab. Pohuwato : 216 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 270 Org				Kab. Bone Bolango ; 270 Org	
				kab. Gorontalo Utara : 324 Org				kab. Gorontalo Utara : 324 Org	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator		Tahun 2018 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA	Kab/Kota	Kota Gorontalo : 23 Org	Rp 550,000,000			Kota Gorontalo : 23 Org	632,500,000
				Kab. Gorontalo : 23 Org				Kab. Gorontalo : 23 Org	
				Kab. Boalemo : 23 Org				Kab. Boalemo : 23 Org	
				Kab. Pohuwato : 23 Org				Kab. Pohuwato : 23 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 23 Org				Kab. Bone Bolango ; 23 Org	
				kab. Gorontalo Utara : 23 Org				kab. Gorontalo Utara : 23 Org	
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMA	Prov.Gorontalo	Kota Gorontalo : 28 Org	Rp 450,000,000			Kota Gorontalo : 28 Org	517,500,000
				Kab. Gorontalo : 28 Org				Kab. Gorontalo : 28 Org	
				Kab. Boalemo : 28 Org				Kab. Boalemo : 28 Org	
				Kab. Pohuwato : 28 Org				Kab. Pohuwato : 28 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 28 Org				Kab. Bone Bolango ; 28 Org	
				kab. Gorontalo Utara : 28 Org				kab. Gorontalo Utara : 28 Org	
	Parade Cinta Tanah Air SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Parade Cinta Tanah Air SMA	Prov.Gorontalo	Kota Gorontalo : 21 Org	Rp 175,000,000			Kota Gorontalo : 21 Org	201,250,000
				Kab. Gorontalo : 54 Org				Kab. Gorontalo : 54 Org	
				Kab. Boalemo : 27 Org				Kab. Boalemo : 27 Org	
				Kab. Pohuwato : 21 Org				Kab. Pohuwato : 21 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 27 Org				Kab. Bone Bolango ; 27 Org	
				kab. Gorontalo Utara : 33 Org				kab. Gorontalo Utara : 33 Org	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Tahun 2018 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) DIKSUS	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional DIKSUS	KAB./KOTA	Kota Gorontalo : 18 Org	Rp 900,000,000			Kota Gorontalo : 18 Org	1,035,000,000
				Kab. Gorontalo : 18 Org				Kab. Gorontalo : 18 Org	
				Kab. Boalemo : 36 Org				Kab. Boalemo : 36 Org	
				Kab. Pohuwato : 18 Org				Kab. Pohuwato : 18 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 36 Org				Kab. Bone Bolango ; 36 Org	
				Kab. Gorontalo Utara : 18 Org				Kab. Gorontalo Utara : 18 Org	
	Festival dan Lomba Seri Siswa Nasional (FLS2N) DIKSUS	Jumlah siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional DIKSUS	KAB./KOTA	Kota Gorontalo : 18 Org	Rp 800,000,000			Kota Gorontalo : 18 Org	920,000,000
				Kab. Gorontalo : 18 Org				Kab. Gorontalo : 18 Org	
				Kab. Boalemo : 36 Org				Kab. Boalemo : 36 Org	
				Kab. Pohuwato : 18 Org				Kab. Pohuwato : 18 Org	
				Kab. Bone Bolango ; 36 Org				Kab. Bone Bolango ; 36 Org	
				Kab. Gorontalo Utara : 18 Org				Kab. Gorontalo Utara : 18 Org	
	Literasi PKLK dan ABK Berseri	Jumlah siswa yang mengikuti Literasi PKLK dan ABK Berseri	KAB./KOTA	Kota Gorontalo : 14 Org	Rp 600,000,000			Kota Gorontalo : 14 Org	690,000,000
				Kab. Gorontalo : 14 Org				Kab. Gorontalo : 14 Org	
				Kab. Boalemo : 28 Org				Kab. Boalemo : 28 Org	
				Kab. Pohuwato : 14 Org				Kab. Pohuwato : 14 Org	
				Kab. Bone Bolango : 28 Org				Kab. Bone Bolango : 28 Org	
				Kab. Gorontalo Utara : 14 Org				Kab. Gorontalo Utara : 14 Org	

Kode	Program/Kegiatan	Tahun 2018 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus Layanan Khusus	Jumlah siswa yang mengikuti Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus Layanan Khusus	KAB./KOTA	Kota Gorontalo : 35 Org	Rp 2,840,000,000			Kota Gorontalo : 35 Org	3,266,000,000
				Kab. Gorontalo : 35 Org				Kab. Gorontalo : 35 Org	
				Kab. Boalemo : 70 Org				Kab. Boalemo : 70 Org	
				Kab. Pohuwato : 35 Org				Kab. Pohuwato : 35 Org	
				Kab. Bone Bolango : 70 Org				Kab. Bone Bolango : 70 Org	
				Kab. Gorontalo Utara : 35 Org				Kab. Gorontalo Utara : 35 Org	
	- Penyediaan Kebutuhan Siswa Boarding School (Makan Minum)	Jumlah Siswa SLB Boarding School		Kota Gorontalo : 35 Org	Rp 742,000,000			Kota Gorontalo : 35 Org	853,300,000
				Kab. Gorontalo : 65 Org	Rp 1,378,000,000			Kab. Gorontalo : 65 Org	1,584,700,000
				Kab. Boalemo : 50 Org	Rp 1,060,000,000			Kab. Boalemo : 50 Org	1,219,000,000
				Kab. Pohuwato : 60 Org	Rp 1,272,000,000			Kab. Pohuwato : 60 Org	1,462,800,000
				Kab. Bone Bolango : 50 Org	Rp 1,060,000,000			Kab. Bone Bolango : 50 Org	1,219,000,000
				Kab. Gorontalo Utara : 25 Org	Rp 530,000,000			Kab. Gorontalo Utara : 25 Org	609,500,000
	Pengembangan Unit Produksi dan Inovasi SMK	Setiap Sekolah mampu mengembangkan Produk Unggulan Berbasis Potensi Daerah	Prov.Gorontalo	55 Sekolah	Rp 2,750,000,000			55 Sekolah	3,162,500,000
	Pengembangan Sertifikasi Lembaga Profesi di SMK	Tamatan SMK memperoleh Kemampuan Kompetensi Industri dalam dunia kerja, baik di tingkat Regional maupun Internasional	Prov.Gorontalo	Agribisnis (3 Kompetensi Keahlian)	Rp 450,000,000			Agribisnis (3 Kompetensi Keahlian)	517,500,000
			Prov.Gorontalo	Agroteknologi (3 Kompetensi Keahlian)	Rp 450,000,000			Agroteknologi (3 Kompetensi Keahlian)	517,500,000
			Prov.Gorontalo	Kemaritiman(3 Kompetensi Keahlian)	Rp 450,000,000			Kemaritiman(3 Kompetensi Keahlian)	517,500,000
			Prov.Gorontalo	Pariwisata(3 Kompetensi Keahlian)	Rp 450,000,000			Pariwisata(3 Kompetensi Keahlian)	517,500,000
			Prov.Gorontalo	Teknologi dan Rekayasa (5 Kompetensi Keahlian)	Rp 750,000,000			Teknologi dan Rekayasa (5 Kompetensi Keahlian)	862,500,000